

PERAN PARISADA DALAM MENANAMKAN NILAI-NILAI ETIKA POLITIK HINDU STUDI DI KABUPATEN TULANG BAWANG

Oleh:

Wayan Sukarlinawati¹, Wayan Putu Umbare²
stahlampung2019@gmail.com

Sekolah Tinggi Agama Hindhu Lampung

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondidi politik Agar berjalannya roda pemerintahan daerah yang baik, baik untuk tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, maka orang yang duduk di kursi pemerintahan harus orang-orang yang berkompeten untuk menjalankan roda pemerintahan, karena tidak setiap orang mampu menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Partisipasi politik adalah kegiatan masyarakat, dimana masyarakat berperan serta secara aktif dalam pemilihan pemerintah, yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kebijakan publik (public policy). Umat Hindu diharapkan untuk dapat berpartisipasi dalam politik praktis dengan mengedepankan kesadaran politik dan etika politik yang santun berlandaskan kitab Suci Weda. Persoalan pokok yang dijadikan rumusan masalah yaitu *pertama*, Bagaimanakah kondisi politik Umat Hindu di Kabupaten Tulang Bawang? Dan *kedua* Bagaimana Parisada Kabupaten Tulang Bawang Menanamkan Nilai-Nilai Etika Politik Hindu pada Umat Hindu? Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif, yaitu jenis penelitian yang mengkaji dan yang dapat menggambarkan realita sosial yang kompleks dan konkrit. Parisada Kabupaten Tulang Bawang telah melakukan upaya pembelajaran politik dengan menanamkan nilai-nilai etika politik berdasarkan pada ajaran sastra Hindu yang terdapat pada Kitab Suci atau sumber sastra lainnya berupa Lontar Pati Raja Gundala. Maksud penanaman nilai etika politik Hindu ini adalah agar umat Hindu dapat menilai dan menyikapi segala bentuk dinamika politik yang terjadi baik pada sistem politiknya, perilaku politikus atau pun kegiatan-kegiatan lainnya yang berindikasi pada perilaku politik yang ada. Parisada Kabupaten Tulang Bawang telah memberikan pembelajaran etika politik melalui pertemuan dan koordinasi, yang hal ini dibenarkan oleh para tokoh pendidik, tokoh masyarakat, dan tokoh agama yang ada di Kabupaten Tulang Bawang. Hal ini ditunjukkan pula oleh keberhasilan dua tokoh politik muda dari masyarakat Bali yang lolos Pemilihan Legislatif 2019 lalu yaitu yaitu I Ketut Saspiyanto dari Dapil IV (Gedong Meneng), dan Ketut Kasub Indrajaya Dapil II (BanjarAgung, Banjar Margo dan Banjar Baru)

kata kunci : *Peran Parisada, Menanamkan Nilai-Nilai Etika Politik Hindu*

PENDAHULUAN

Agar berjalannya roda pemerintahan daerah yang baik, baik untuk tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, maka orang yang duduk di kursi pemerintahan harus orang-orang yang

berkompeten untuk menjalankan roda pemerintahan, karena tidak setiap orang mampu menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Untuk itu, dalam proses pemilihan kepala daerah, rakyat yang berada dalam wilayah daerah tersebut harus teliti dalam memilih kepala daerah,

jangan sampai salah dalam memilih kepala daerah. Untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota, dipilih secara langsung oleh rakyat, dipilih secara demokratis sesuai dengan pasal 18 ayat 4 Undang Undang Dasar 1945.

Tentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah, di Indonesia tata pelaksanaannya diatur dalam Undang – Undang nomor 1 tahun 2015. Berdasarkan pasal 2 dan pasal 3 ayat 1 Undang – Undang nomor 1 tahun 2015, pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (pasal 2); pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (pasal 3 ayat 1). Jika melihat ketentuan undang-undang ini pelaksanaan pemilihan kepala daerah tidak berbeda dengan pemilihan umum biasa. Sukses atau tidaknya pelaksanaan pemilihan kepala daerah bisa dilihat dari partisipasi politik masyarakatnya, karena keikutsertaan masyarakat dalam proses pemilihan kepala daerah merupakan salah satu bagian dari partisipasi politik. Hal ini sesuai yang diungkapkan oleh Herbert Mc. Closky (Arifin. 2015:78) yang berpendapat bahwa partisipasi politik adalah kegiatan masyarakat, dimana masyarakat berperan serta secara aktif dalam pemilihan pemerintah, yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kebijakan publik (public policy).

Kegiatan itu mencakup tindakan politik seperti menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum, menghadiri kampanye politik, mengadakan diskusi (lobby) dengan politisi atau pemerintah. Jadi pemilihan kepala daerah merupakan salah satu bagian dari partisipasi politik. Karena dalam prosesnya, masyarakat secara sukarela memilih calon kepala

daerah sesuai pilihannya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Semakin banyak masyarakat yang turut berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah, maka semakin baik pula pelaksanaan pemilihan kepala daerah tersebut.

Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Budiardjo (2008:369) yang menyatakan bahwa dalam negara-negara yang menganut sistem demokrasi menganggap bahwa semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi dalam politik, itu menunjukkan sesuatu hal yang baik. Karena partisipasi politik menunjukkan bahwa warga negara mengikuti dan memahami masalah politik dan memiliki kecenderungan untuk melibatkan diri dalam hal-hal itu.

Menurut Budiardjo (2008:369) partisipasi politik erat kaitannya dengan kesadaran politik, karena semakin sadar seseorang bahwa dirinya dipimpin, maka seseorang akan menuntut untuk diberikan hak untuk bersuara dalam pemerintahan. Wujud kesadaran politik yang paling umum dalam masyarakat tingkat daerah adalah memberikan suara dalam pemilihan kepala daerah. Partisipasi yang dilandasi oleh sebuah kesadaran politik akan mendorong individu menggunakan hak pilihnya secara rasional. Kesadaran politik akan memunculkan peran aktif masyarakat dalam memilih kepala daerah yang berkualitas dan berkompeten. Namun dalam kenyataannya tidak setiap orang memiliki kesadaran politik yang tinggi, mereka menganggap bahwa pemilihan kepala daerah itu bukanlah sesuatu yang penting, karena mereka menganggap siapapun yang akan terpilih menjadi kepala daerah tidak akan membawa perubahan bagi kehidupan masyarakat. Selain itu, mereka juga menjelaskan lebih memilih untuk bekerja untuk menghidupi kehidupan sehari-hari

dari pada datang ke TPS untuk menyalurkan hak pilihnya dalam pemilihan kepala daerah. Ini merupakan sebuah gambaran dari masyarakat yang kurang memiliki kesadaran tentang pentingnya politik. Ketidakikutsertaan masyarakat dalam proses pemilihan kepala daerah, sangat mempengaruhi hasil dari pemilihan kepala daerah itu sendiri.

Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Wisnu BawaTenaya mengimbau umat Hindu untuk menyongsong Pemilu dengan merdeka dan gembira. Parisada yang merupakan Lembaga majelis tertinggi umat Hindu bersifat Netral dalam Pemilu.

Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Tulang Bawang masa bakti 2018 - 2023 yang dipimpin Wayan Putu Umbare sebagai ketua, Ketut Rameo,S.E sebagai Sekretaris dan Ketut Kasub Indrajaya sebagai bendahara, bersama Pemerintah Daerah Tulang Bawang bekerja sama mensukseskan Pemilu 2019. Umat Hindu diharapkan untuk dapat berpartisipasi dalam politik praktis dengan mengedepankan kesadaran politik dan etika politik berlandaskan Weda.

Dari latar belakang di atas maka penulis tertarik dengan kiprah Parisada Kabupaten Tulang Bawang membangun kesadaran politik umat Hindu Kabupaten Tulang Bawang dalam penelitian berjudul, "*Peran Parisada dalam Menanamkan Nilai-nilai Etika Politik Hindu, Studi di Kabupaten Tulang Bawang.*"

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian adalah Kabupaten Tulang Bawang.. Adapun waktu penelitian tentang Peran Parisada dalam Menanamkan Nilai-Nialai Politik Hindu Studi di Kabupaten Tulang Bawang

dilakukan mulai pada bulan Juni sampai dengan bulan Oktober 2021.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif, yaitu jenis penelitian yang mengkaji dan yang dapat menggambarkan realita sosial yang kompleks dan konkrit.

Peneliti dapat menggali informasi yang diperlukan kepada pengurus Parisada serta pihak-pihak lain yang dianggap dapat memberikan informasi atau jawaban atas masalah dalam penelitian. Jadi dari informan kunci (*key informant*) tersebut peneliti mencari subjek-subjek lain secara terus-menerus sampai peneliti merasa jenuh karena sudah tidak dapat menemukan lagi subjek yang tepat. Jadi jumlah informan peneliti ini tidak ditentukan secara pasti tergantung pada tingkat keperluan data yang digunakan.

Teknik pengupulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data yaitu data yang telah ditemukan di lapangan kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif dari Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan kesimpulan (Salim dan Syahrudin, 2007 : 147).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Politik Umat Hindu di Kabupaten Tulang Bawang

Daerah dengan namanya yang unik ini, secara khusus memiliki latar belakang sejarah yang demikian panjangnya, karena menurut Al Haidar, penulis buku Lampung Bersimbah Darah, nama ini berasal dari bahasa cina yaitu To Lang Po'Hwang, yang pada akhirnya di kenal umum dengan sebutan Tulang Bawang. Dalam buku tersebut juga termaktub

bahwa nama ini adalah nama satu di antara sekian kerajaan kuno yang ada di nusantara. Kemudian Al-Haidar mengutip J.W.Narding yang menyatakan bahwa pusat pemerintahan kerajaan Tulang Bawang ini terletak di tepi sungai Tulang Bawang antara Kota Menggala dan Kampung Pagar Dewa dalam radius \pm 20Km, namun sejak tahun 700M nama kerajaan ini tidak lagi terdengar. Nampaknya setelah berakhirnya era kerajaan di Tulang Bawang ini system pemerintahan yang ada hanyalah pemerintahan adat, yaitu kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan berada pada tua-tua adat yang secara khusus di daerah Lampung di sebut “penyembang”, system ini nampaknya telah berlaku hingga datangnya kolonialisme Belanda ke daerah ini pada akhir abad ke-17 menurut De Jagger 1687M. Sejak itulah kekuasaan penyembang di daerah ini mulai menurun, sungguhpun di fungsikan namun nilai hakikinya sudah tidak lagi sebagaimana sebelumnya, sebab menurut pengamatan nampaknya parapenyembang hanya di beri kekuasaan yang mirip dengan kekuasaan Legislative saat ini, namun kadar kekuasaan minim sekali di bandingkan kekuasaan Eksekutif yang jauh lebih besar.

Selanjutnya pada era kemerdekaan Tulang Bawang menjadi salah satu kewedanaan di wilayah Kabupaten Lampung Utara. Sebagai kewedanaan Tulang Bawang di bagi menjadi tiga wilayah keasisten wedanaan (Kecamatan) yang di pimpin oleh seorang asisten wedana (sekarang Camat), yaitu asisten Wedana Panaragan, Asisten Wedana Menggala dan Asisten Wedana Mesuji. Lantas sejak terhitung tahun 1997, sesuai undang-undang No. 2 Tahun 1997 tentang pengesahan berdirinya Kabupaten Tulang Bawang dan Tanggamus, secara resmi daerah ini berdiri sendiri dengan nama

Kabupaten Tulang Bawang sebagai salah satu Kabupaten di dalam daerah Provinsi Lampung dengan wilayahnya yang meliputi wilayah sebagaimana di tetapkan oleh pemerintah Belanda tahun 1930 dalam Peta Marga Afdelling, yakni wilayah Marga Tegamo’an, Marga Buai Bulan, Marga Suai Umpu dan Marga Aji. Dalam kurun waktu dari tahun 1981 sampai dengan 1997, telah terjadi pergantian pejabat pembantu Bupati selama beberapa masa bhakti, yang di jabat oleh: 1. Drs. Hi. M. yusup Nur (masa bhakti 1981 s.d 1985) 2. Cardinal, BA (masa bhakti 1985 s.d 1989) 3. Drs. Hi. Somali Saleh (masa bhakti 1989 s.d 1993) Drs. Rukhyat Kusumayudha (masa bhakti 1993 s.d 1994) 5. Drs. Tamanuri (masa bhakti 1994 s.d 1996) 6. Hi. Santori Hasan, SH (masa bhakti 1996 s.d 1997) Pada tahun 1997, dibentuklah sekertariat persiapan Kabupaten Tulang Bawang, dengan sekertaris merangkap pembantu Bupati Lampung Utara Wilayah Menggala Hi. Santori Hasan, SH. Selanjutnya untuk memuluskan pembentukan Kabupaten, di tunjuklah Hi. Santori Hasan, SH sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Tulang Bawang sejak tanggal 20 Maret sampai dengan 9 Desember 1997 melalui Surat Keputusan Gubernur No. 821.2/II/09/97 tanggal 14 Januari 1997 tentang Penunjukkan Plt Bupati Kabupaten Tingkat II Persiapan Tulang Bawang. Melalui serangkaian proses yang cukup melelahkan, akhirnya Kabupaten Tulang Bawang lahir, dan di resmikan keberadaanya oleh Mentri Dalam Negeri pada tanggal 20 Maret 1997, sebagai tindak lanjut di tetapkan UU No. 2 Tahun 1997 tentang pembentukan daerah tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus. Dimana untuk selanjutnya pada tanggal 24 November 1997 terpilihlah Hi. Santori Hasan, SH sebagai

Bupati Tulang Bawang pertama, untuk periode tahun 1997- 2002, yang di lantik pada tanggal 9 Desember 1997.

Pada proses selanjutnya, melalui proses pemilihan Bupati Tulang Bawang pada tanggal 12 November 2002 terpilih Dr. Abdurachman Sarbini, dan AA. Syofandi sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang untuk periode 2002-2007, yang di lantik pada tanggal 9 Desember 2002. Kemudian melalui proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung oleh masyarakat yang pertama kali di laksanakan pada tahun 2007, Dr. Abdurachman Sarbini kembali terpilih sebagai Bupati Tulang Bawang periode 2007-2012, berpasangan dengan Drs. Agus Mardihantono, MM, sebagai Wakil Bupati, yang di lantik pada tanggal 9 Desember 2007. Sementara itu sejak berdirinya Kabupaten Tulang Bawang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang juga mengalami proses pergantian pucuk pimpinan. Pada periode 1997-1999, Ketua DPRD di jabat Abdi SP, pada periode 1999-2004 Ketua DPRD di jabat Samsul Hadi, dan periode 2004-2009 Ketua DPRD di jabat Lamijiono, S.Pd, MM, yang kemudian sebelum masa bhakti berakhir di gantikan oleh Herman Artha. Pada tanggal 18 Agustus 2009, anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang periode 2004-2009 secara resmi mengakhiri masa jabatannya, yang kemudian melalui mekanisme yang berlaku di gantikan oleh Anggota DPRD periode berikutnya yaitu 2009-2014, yang merupakan hasil Pemilu Legislatif 9 April 2009. Sedangkan Ketua DPRD masa bhakti 2009-2014 adalah Winarti, SE yang di lantik pada tanggal 19 Oktober 2009. Kabupaten Tulang Bawang yang pada awal berdirinya memiliki luas Wilayah 7.770,84 km² atau 22% dari

Wilayah Lampung, merupakan Kabupaten terbesar di Provinsi Lampung.

Menyadari luas Wilayah dan besarnya tantangan pembangunan Kabupaten Tulang Bawang, maka dengan di dukung aspirasi masyarakat, pada tahun 2007, Bupati Tulang Bawang Dr. Abdurachman Sarbini mengambil sebuah terobosan besar dengan memekarkan wilayah Kabupaten Tulang Bawang menjadi 3 Kabupaten, yaitu Kabupaten Induk Kabupaten Tulang Bawang, dan dua Kabupaten baru, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji. Sedangkan dalam prosesnya, pemekaran Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Mesuji akhirnya dapat di wujudkan, yaitu dengan di sahkannya UU Nomor 49 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Mesuji dan UU Nomor 50 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat, tanggal 26 November 2008, yang kemudian di resmikan penderitannya tanggal 3 April 2009, yang di tandai dengan di lantiknya kedua Pejabat (Pj) Bupati di dua daerah otonomi baru tersebut oleh Menteri Dalam Negeri Mardiyanto. Setelah wilayahnya di mekarkan, kini Kabupaten Tulang Bawang memiliki luas wilayah 4385.84 km² dengan 15 kecamatan, 151 kampung atau kelurahan.

KPU Kabupaten Tulang Bawang menetapkan daftar pemilih tetap atau yang biasa juga di sebut (DPT) Pilkada Kabupaten Tulang Bawang 2017. Daftar pemilih tetap tersebut berjumlah 299.032 pemilih. Jumlah tersebut terdiri dari 155.351 laki-laki dan 143.681 perempuan yang tersebar di limabelas Kecamatan yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Data yang di terima oleh KPU jumlah DPT Kabupaten Tulang Bawang paling banyak pada Kecamatan Dente Teladas dengan 47.378 pemilih, Di ikuti dengan Kecamatan Menggala

dengan 32.349 pemilih, Kecamatan Banjar Margo dengan 27.880 pemilih, Kecamatan Gedung Meneng dengan 26.133 pemilih, Kecamatan Penawar Tama dengan 23.165 pemilih, Kecamatan Banjar Agung 22.381 pemilih, Kecamatan Rawajitu Selatan dengan 29.584 pemilih, Kecamatan Gedung Aji Baru dengan 16.089 pemilih, Kecamatan Penawar Aji dengan 15.117 pemilih, Kecamatan Rawa Pitu dengan 12.663 pemilih, Kecamatan Meraksa Aji dengan 12.018 pemilih, Kecamatan Rawa Jitu Timur dengan 11.920 pemilih, Kecamatan Banjar Baru dengan 11.527 pemilih, Kecamatan Menggala Timur dengan 10.502 pemilih, Kecamatan Gedung Aji Lama dengan 10.326 pemilih Untuk tahun Pemilihan Legislatif tahun 2019, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menjadi peraih kursi terbanyak yaitu 10 kursi dari dari 40 kursi yang ada di DPRD Kabupaten Tulang Bawang atau sekitar 25 % kursi DPRD, disusul Gerindra 22,5 %, PAN 17,5%, dan Golkar 15 %. Sisanya 3 partai meraih hanya 5%. Sumber KPU Tulang Bawang menyatakan bahwa Pemilu Serentak Tahun 2019 yang usai digelar pada 17 April 2019 lalu mampu mendulang partisipasi pemilih yang cukup tinggi yaitu 81,97 persen untuk Pilpres dan 81,69 persen untuk Pileg. Jika dibandingkan dengan partisipasi pemilih pada Pemilu 2014. Pileg hanya di angka 75,11 persen. Sementara Pilpres 71,31 persen. Berdasarkan data diatas menjadi gambaran mengenai kondisi kependudukan serta politik yang ada.

B. Parisada Kabupaten Tulang Bawang Menanamkan Nilai-Nilai Etika Politik Hindu Pada Umat Hindu

Mendengar kata politik menurut pendapat beberapa pihak seperti yang diungkapkan oleh tokoh masyarakat sekaligus Klian Banjar di Kabupaten Tulang Bawang pada tanggal 10 Agustus 2021 yaitu Bapak Nyoman Sudiarta beralamat di Kampung Menggala Kecamatan Menggala Timur menyatakan bahwa :

“Banyak pihak yang beranggapan bahwa politik adalah kotor karena politik selalu diidentikkan dengan perebutan kekuasaan yang menghalalkan segala cara. Akan tetapi, Hindu memandang politik tidak semata-mata sebagai cara mencari, dan mempertahankan kekuasaan, melainkan adalah bagi penegakkan Dharma.”

Kesadaran politik merupakan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara (Surbakti, 2007: 144). Sebagai warga negara yang berdaulat, paling tidak ada dua hal mendasar yang harus disadari masyarakat yaitu hak dan kewajibannya. Tentang tujuan politik yang menegakkan dharma, peneliti menemukan sloka yang dijelaskan dalam percakapan antara Bhagawan Bhisma dengan Yudhistira pasca perang Bharatayudha, yaitu dalam Santi Parwa LXIII, hal 147, sebagai berikut:

"Manakala politik telah sirna, Veda pun sirna pula, semua aturan hidup hilang musnah, semua kewajiban manusia terabaikan. Pada politiklah semua terlindung. Pada politiklah semua awal tindakan diwujudkan, pada politiklah semua pengetahuan dipersatukan, pada politiklah semua dunia terpusatkan". Dalam bab yang lain Santi Parwa LXIII, hal 147 dijelaskan pula bahwa :

"Ketika tujuan hidup manusia - dharma, artha, kama, dan moksa semakin jauh. Begitu juga pembagian masyarakat semakin kacau, maka pada politiklah semua berlindung, pada politiklah semua kegiatan agama/yajna diikatkan, pada politiklah semua pengetahuan dipersatukan, dan pada politiklah dunia terpusatkan".

Untaian kalimat dalam Santiparwa tersebut mengisyaratkan bahwa antara Politik dan Agama mempunyai kaitan yang sangat erat, yaitu politik Hindu adalah untuk menjalankan dan menegakkan ajaran Dharma. Dharma adalah hukum, kewajiban, dan kebenaran yang apabila dilanggar maka akan berakibat pada kehancuran umat manusia, dan sebaliknya dharma yang dijaga akan membawa kemuliaan (dharma raksatah raksitah).

Antara politik dan kepemimpinan merupakan sebuah mata uang yang tak dapat dipisahkan. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu memberikan tauladan, selalu mengusahakan kesejahteraan rakyat (sukanikang rat), dan menghindari kesenangan pribadi (agawe sukaning awak). Dalam Kautilya Arthashastra dijelaskan pula bahwa "apa yang menjadikan raja senang bukanlah kesejahteraan, tetapi yang membuat rakyat sejahtera itulah kesenangan seorang raja". Kalimat ini menunjukkan bahwa sasaran pokok dalam politik Hindu adalah kebahagiaan rakyat, bukanlah kesejahteraan penguasanya karena penguasa yang berhasil membawa rakyatnya pada kebahagiaan tertinggi, kemuliaan adalah pasti ("*sang sura menanging ranaggana, mamukti sukha wibawa, bogha wiryawan*").

Upaya Parisada Kabupaten Tulang Bawang dalam menanamkan etika Politik yang santun kepada umat Hindu khususnya yang ada di Kabupaten Tulang Bawang bekerja sama dengan beberapa elemen – lembaga keagamaan Hindu seperti organisasi Peradah, Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI), Praja Niti, dan terutama Paruman Sulinggih yang ada di Kabupaten Tulang Bawang.

Penanaman etika politik pada umat Hindu yang dilakukan oleh Parisada Kabupaten Tulang Bawang dilakukan sesuai dengan ajaran agama dan Sastra Hindu. Menurut Jero Gede Putu Gede Tame dalam wawancara tanggal 27 Agustus 2021 Jero Gede Putu Gede Tame menyatakan bahwa :

“Dalam Agama Hindu terdapat enam etika yang dapat dijadikan panduan dalam politik yang disebut Sad Upaya Sandi. Sad Upaya Sandi terdapat dalam Lontar Raja Pati Gundala yang isinya antara lain : Siddhi, kemampuan untuk mengadakan persahabatan. Wigrha, kemampuan untuk memisahkan setiap permasalahan atau persoalan serta dapat mempertahankan hubungan baik. Wibawa, memiliki kewibawaan, Winarya, cakap dalam memimpin. Gasraya, kemampuan untuk menghadapi lawan yang kuat, dan Sthanna, dapat mempertahankan setiap hubungan yang baik.”

Senada dengan hal tersebut di atas tokoh pendidik Hindu yang bernama Ketut Suwarte yang beralamat di Dusun Gita Nagari Baru Menggala Timur menyatakan bahwa:

“Parisada Kabupaten Tulang Bawang dalam setiap pembinaan Agama Hindu baik dalam pertemuan dengan

kelompok masyarakat, tokoh umat maupun tokoh agama sering menyerukan kepada umat Hindu untuk dapat berhubungan dengan seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang dengan santun dan mengedepankan etika Hindu berdasarkan sastra-sastra Hindu. Dalam sistem pemerintahan kerajaan jaman dahulu terdapat istilah Sad Upaya Sandi berisi enam sifat pemimpin dalam mengelola pemerintahan atau organisasi. Panduan etika kepemimpinan dalam Sad Upaya Sandi dapat dijadikan pedoman etika politik baik etika yang dipegang oleh pemimpin maupun etika yang dipegang oleh orang yang dipimpin. Sad Upaya Sandi merupakan bentuk *check and balance* hubungan pemimpin dengan yang dipimpin,” pungkas Suwarte menjawab tentang panduan etika berpolitik.”

Sementara jawaban tentang panduan etika berpolitik dijawab pula oleh Pan Desimawati yang beralamat di Kampung Bujuk Agung Kec Banjar Margo pada wawancara tanggal 18 Agustus 2021 menjawab bahwa:

“Umat Hindu sebenarnya tidak alergi dalam berpolitik. Hanya terkadang para politikus itu sendiri yang tidak mempunyai etika politik. Ini terjadi biasanya menjelang Pemilihan Legislatif atau menjelang Pilkada. Politikus mencoba menarik suara khususnya suara dari umat Hindu dengan janji-janji manis untuk membantu, namun setelah mereka telah berhasil meraih kekuasaan, janji-janji tersebut dilupakan atau bahkan diingkari oleh oknum politisi bersangkutan. Maka agama Hindu

berusaha mengantisipasi perilaku yang negative dari politisi dengan panduan Sastra seperti dalam Lontar Pati Raja Gundala yang berisi enam sifat – sifat mulia yang harus dimiliki oleh pemimpin atau calon pemimpin, yaitu Siddhi, Wigrha, Wibawa, Winarya, Gasraya, dan Sthanna. Parisada Kabupaten Tulang Bawang setiap melakukan koordinasi dan sosialisasi program kerjanya mencoba memberikan pembelajaran politik berupa himbauan dan ajakan kepada umat Hindu disetiap banjar yang ada di kabupaten Tulang Bawang untuk selalu mengamati dan bijak dalam memilih atau menilai calon – calon pemimpin baik di dewan atau pun di pemerintahan agar tidak lagi terjebak pada janji manis politikus,” jawab Pan Desimawati.”

Dari tiga jawaban tokoh agama, tokoh pendidik, dan tokoh masyarakat tersebut di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa Parisada Kabupaten Tulang Bawang telah melakukan upaya pembelajaran politik dengan menanamkan nilai – nilai etika politik berdasarkan pada ajaran sastra Hindu yang terdapat pada Kitab Suci atau sumber sastra lainnya berupa Lontar Pati Raja Gundala. Maksud penanaman nilai etika politik Hindu ini adalah agar umat Hindu dapat menilai dan menyikapi segala bentuk dinamika politik yang terjadi baik pada sistem politiknya, perilaku politikus atau pun kegiatan – kegiatan lainnya yang berindikasi pada perilaku politik yang ada.

Sementara itu wawancara dengan tokoh pendidik lainnya yaitu Ibu Sista Dewi Wahyuningrum, S.Ag.pada tanggal 15 Agustus 2021 menyatakan bahwa :

“Hindu telah memiliki dasar –dasar dalam melakukan politik yang

beretika yaitu Konsep Catur Paramita. Dalam hubungannya dengan dunia luar yang berhubungan dengan daerah atau tempat bertugas, seorang pemimpin harus melengkapi dirinya dengan ajaran Catur Paramita, yaitu empat sifat dan sikap yang utama bagi pemimpin, yang terdiri dari : Maitri, artinya seorang pemimpin harus dapat memandang orang lain sebagai karib, baik dilihat dari kedudukan sebagai insan hamba Tuhan maupun dari tujuan hidupnya. Karuna, artinya pemimpin harus dapat memberikan bantuan kepada orang yang memerlukan bantuan. Upeksa, artinya pemimpin tidak boleh terlalu memperhatikan ocehan orang lain, seperti tidak mudah dipengaruhi, dihasut dan diadu domba. Mudita, artinya pemimpin harus selalu berusaha untuk mendapatkan simpati orang lain. Dan pengamatan saya selama ini Parisada sebagai lembaga Agama tertinggi umat yang ada di Kabupaten Tulang Bawang cukup memberikan arahan tentang politik dengan menghimbau umat untuk tidak melakukan politik Golput, dengan tidak memilih satu pun calon bila ada pemilihan seorang pemimpin.”

Tokoh agama yaitu Jero Mangku Wijiono yang Kampung Sungai Nibung Kecamatan Dente Teladas dalam wawancara tanggal 10 Agustus 2021 menyatakan Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Tulang Bawang bersama tokoh agama yang ada di Kabupaten Tulang Bawang melakukan sinergi dalam penanaman nilai etika dalam berpolitik khususnya umat Hindu yang akan terjun dalam dunia politik.

“PHDI Tulang Bawang bersama seluruh elemen organisasi Hindu melakukan kerjasama untuk membuka wawasan politik umat Hindu agar umat Hindu tidak tertinggal dengan umat beragama lainnya di Tulang Bawang. Agama Hindu memiliki dasar etika politik seperti konsep Panca Stiti Dharmaning Prabhu. Ajaran ini diwejangkan oleh Arjuna Sastrabahu, bahwa seorang pemimpin hendaknya menunjukkan sifat dan keteladanan kepada bawahan yang dipimpinnya. Panca Stiti Dharmaning Prabhu adalah lima macam sifat dan sikap tauladan yang harus dipedomi oleh seorang pemimpin dalam memimpin bawahannya. Sifat dan sikap yang dimaksud antara lain, sebagai berikut:

- a. Ing Ngarsa Asung Tulada, didepan bawahan atau masyarakat seorang pemimpin harus memberikan contoh untuk melakukan perbuatan yang baik, memberikan semangat pengabdian yang tinggi dan luhur untuk kepentingan bangsa dan agama.
- b. Ing Madya Mangun Karsa, artinya di tenga-tengah masyarakat atau bawahannya seorang pemimpin hendaknya mampu mengembangkan dan membangkitkan semangat kreativitas untuk mencapai kemajuan bersama.
- c. Tut Wuri Andayani, artinya seorang pemimpin hendaknya mampu memberikan dorongan semangat, kebebasan berkegiatan dan mengembangkan ide-ide bawahan atau masyarakat yang dipimpinnya sepanjang bersifat positif, dengan demikian masyarakat yang

- dipimpinnya akan mengalami kemajuan yang sempurna.
- d. Maju tanpa bala, artinya seorang pemimpin harus berani maju kedepan walaupun tanpa anak buah, bahkan berani berkorban demi kepentingan bawahannya
 - e. Sakti tanpa aji, artinya seorang pemimpin yang berhasil dalam melaksanakan tugas, ia tidak mau terlalu dipuji-puji dan disanjung-sanjung.

Ajaran ini lah yang akan membuat seseorang menjadi sukses tanpa menyakiti orang lain, baik dalam berorganisasi, bermasyarakat, maupun berpolitik, karena telah jelas dasarnya sebagai pedoman berperilaku politik.” (Jero Mangku Wijiono, 10 Agustus 2021).

Dijelaskan pula oleh Jero Mangku Wayan Purnawirawan beralamat di Kampung Kahuripan Dalam Kecamatan Menggala Timur dalam wawancara tanggal 5 Agustus 2021 mengatakan bahwa :

“Menurut kitab suci Weda, politik merupakan cara untuk mencapai tujuan (menegakkan dharma). Dimana dalam pelaksanaan untuk mencapai tujuan harus tetap berlandaskan akan agama sertamoral dan etika. Karena itu, respon masyarakat Bali di Tulang Bawang berpendapat tidaklah dibenarkan jika massa parpol melakukan persembahyangan di pura-pura dengan tujuan politis apalagi dilengkapi dengan atribut parpol, kecuali jika massa parpol tersebut kepura dengan busana yang tepat tanpa tendensi politis melainkan semata-mata hanya untuk memohonkan kerahayuan dan kerahajengan bersama. Terlebih lagi

bila disertai dengan dharmawacana yang menyuarakan pesan-pesan moral (bukan pesan sponsor parpol).

Hal serupa diungkap oleh Masyarakat Bali di Tulang Bawang seorang tokoh pendidik Bapak IGede Windia dari desa Cahyou Randu Kecamatan Banjar Baru Tulang Bawang dalam wawancara tanggal 5 Agustus 2021 menyatakan bahwa :

“Boleh disebut masyarakat Bali khususnya di Kabupaten Tulang Bawang yang mengambang karena tak punya pemimpin yang mengayomi masalah moral, termasuk masalah agama dan politik. Kalaupun ada tokoh-tokoh agama di pedesaan, seperti pengurus Klian Banjar atau pemimpin warga atau pemuka adat termasuk pemangku dan sulinggih. Namun, kebanyakan darimereka tak bisa meredam huru-hara yang berbau politik, karena para elite politik sudah memberikan banyak hal yang menggiurkan, posko untuk berkumpul, bensin, baju kaos dan atribut partai untuk identitas kelompok. Adanya era multi partai seperti sekarang ini sungguh mencemaskan banyak orang. Kecemasan orang memang beralasan, karena masyarakat Bali di Tulang Bawang buta politik tidak paham bagaimana menyalurkan aspirasinya di era multipartai ini. Disinalah peran Parisada kabupaten Tulang Bawang memberikan pembelajaran etika Politik agar masyarakat memahami dan meleak Politik. Periode kepengurusan Parisada periode ini cukup banyak memberikan pemahaman Politik sehingga masyarakat Bali khususnya umat

Hindu telah memiliki wakil rakyat di DPRD Tulang Bawang.“

Pernyataan Bapak I Gede Windia merujuk pada keberhasilan dua tokoh politik muda dari masyarakat Bali yang lolos Pemilihan Legislatif 2019 lalu yaitu yaitu I Ketut Saspiyanto dari Dapil IV (Gedong Meneng), dan Ketut Kasub Indrajaya Dapil II (Banjar Agung, Banjar Margo dan Banjar Baru).

Dapat disimpulkan bahwa Parisada Kabupaten Tulang Bawang telah memberikan pembelajaran etika politik melalui pertemuan dan koordinasi, yang hal ini dibenarkan oleh para tokoh pendidik, tokoh masyarakat, dan tokoh agama yang ada di Kabupaten Tulang Bawang.

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil peneitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Untuk tahun Pemilihan Legislatif tahun 2019, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menjadi peraih kursi terbanyak yaitu 10 kursi dari dari 40 kursi yang ada di DPRD Kabupaten Tulang Bawang atau sekitar 25 % kursi DPRD, disusul Gerindra 22,5 %, PAN 17,5%, dan Golkar 15 %. Sisanya 3 partai meraih hanya 5%.

Sumber KPU Tulang Bawang menyatakan bahwa Pemilu Serentak Tahun 2019 yang usai digelar pada 17 April 2019 lalu mampu mendulang partisipasi pemilih yang cukup tinggi yaitu 81,97 persen untuk Pilpres dan 81,69 persen untuk Pileg. Jika dibandingkan dengan partisipasi pemilih pada Pemilu 2014. Pileg

hanya di angka 75,11 persen. Sementara Pilpres 71,31 persen. Tentu hal tersebut menjadi suatu yang cukup menggembirakan dan patut diapresiasi sebagai salah satu keberhasilan dalam proses pemilu kita.

2. Parisada Kabupaten Tulang Bawang telah melakukan upaya pembelajaran politik dengan menanamkan nilai – nilai etika politik berdasarkan pada ajaran sastra Hindu yang terdapat pada Kitab Suci atau sumber sastra lainnya berupa Lontar Pati Raja Gundala. Maksud penanaman nilai etika politik Hindu ini adalah agar umat Hindu dapat menilai dan menyikapi segala bentuk dinamika politik yang terjadi baik pada sistem politiknya, perilaku politikus atau pun kegiatan-kegiatan lainnya yang berindikasi pada perilaku politik yang ada.
3. Parisada Kabupaten Tulang Bawang telah memberikan pembelajaran etika politik melalui pertemuan dan koordinasi, yang hal ini dibenarkan oleh para tokoh pendidik, tokoh masyarakat, dan tokoh agama yang ada di Kabupaten Tulang Bawang. Hal ini ditunjukkan pula oleh keberhasilan dua tokoh politik muda dari masyarakat Bali yang lolos Pemilihan Legislatif 2019 lalu yaitu yaitu I Ketut Saspiyanto dari Dapil IV (Gedong Meneng), dan Ketut Kasub Indrajaya Dapil II (Banjar Agung, Banjar Margo dan Banjar Baru).

B. Saran

1. Kepada parisade Kabupaten Tulang Bawang diharapkan memberikan pendampingan penuh terhadap umat hindu dengan memberikan

- pendidikan politik yang berkesinambungan.
2. Pembinaan terhadap umat tulang bawang terkait politik perlu penekanan lebih lanjut dengan nilai-nilai etika politik berdasar itab Suci.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani, 2012. *Sosiologi : Sistemika, Teori dan Terapan*. Jakarta, PT Bumi Aksara.
- Arifin, Anwar. 2015. *Perspektif Ilmu Politik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Budiharjo, E. (1992). *Sejumlah masalah perkampungan kota*. Bandung: Alumni
- Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- <http://www.rmol.co/read/2013/02/24/99706/Husni-Kamil-Manik:-Keberhasilan-Pemilu-2014-Ditentukan-Empat-Faktor>. diakses pada 24 Februari 2013.